

EVALUASI PENGANGGARAN DINAMIKA PENGANGGARAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN): ANALISIS KASUS ANGGARAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Syafira Apriliani Adhiyat¹, Natazha Putri Nuraini², Eva Hany Fanida³, Melda Fadiyah
Hidayat⁴

25040674294@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674297@mhs.unesa.ac.id², evafanida@unesa.ac.id³,
meldahidayat@unesa.ac.id⁴

Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan salah satu proyek strategis nasional yang memiliki implikasi besar terhadap kebijakan fiskal dan tata kelola pembangunan di Indonesia. Proyek ini tidak hanya mencerminkan upaya pemerataan pembangunan, tetapi juga menjadi ujian terhadap kapasitas penganggaran negara serta efektivitas skema pembiayaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penganggaran pembangunan IKN, termasuk kesiapan sumber pembiayaan, pola alokasi anggaran, serta implikasinya terhadap keberlanjutan proyek strategis nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan yang menggabungkan berbagai sumber literatur dan dokumen kebijakan terkait pembangunan IKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan IKN dirancang melalui kombinasi berbagai skema, seperti APBN, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), investasi swasta, serta dukungan dari badan usaha milik negara. Dinamika penganggaran tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada APBN sekaligus membuka peluang pembiayaan inovatif. Namun demikian, tantangan terkait kepastian investasi, kesiapan regulasi, dan konsistensi kebijakan fiskal masih menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan proyek ini. Oleh karena itu, penguatan tata kelola anggaran dan transparansi kebijakan menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional.

Kata Kunci: Ibu Kota Nusantara, Kebijakan Anggaran, Proyek Strategis Nasional, Pembiayaan Pembangunan, Kebijakan Fiskal.

Abstract

The development of the Capital City of Nusantara (IKN) is one of the national strategic projects that has major implications for fiscal policy and development governance in Indonesia. This project not only reflects efforts to achieve equitable development, but also tests the state's budgeting capacity and the effectiveness of alternative financing schemes outside the State Budget (APBN). This study aims to analyze the dynamics of IKN development budgeting, including the readiness of funding sources, budget allocation patterns, and their implications for the sustainability of national strategic projects. The research method used is a qualitative approach with a literature study that combines various sources of literature and policy documents related to IKN development. The results of the study show that the financing of IKN development is designed through a combination of various schemes, such as the APBN, government cooperation with business entities (KPBU), private investment, and support from state-owned enterprises. These budgeting dynamics show the government's efforts to reduce dependence on the APBN while opening up opportunities for innovative financing. However, challenges related to investment certainty, regulatory readiness, and fiscal policy consistency remain important factors affecting the success of this project. Therefore, strengthening budget governance and policy transparency is key to ensuring the sustainability of IKN development as a national strategic project.

Keywords: Capital City Of Nusantara, Budget Policy, National Strategic Project, Development

Financing, Fiscal Policy.

PENDAHULUAN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur. Kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif pemerintahan, tetapi juga merupakan bagian dari strategi pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada pemerataan pembangunan nasional. Selama beberapa dekade terakhir, pembangunan di Indonesia cenderung terpusat di Pulau Jawa, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kondisi tersebut menyebabkan ketimpangan pembangunan antar wilayah yang cukup signifikan. Selain persoalan ketimpangan wilayah, Jakarta juga menghadapi berbagai tantangan serius seperti kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, serta penurunan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota dipandang sebagai salah satu solusi strategis untuk menciptakan pusat pemerintahan yang lebih efisien sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa.

Namun demikian, pembangunan ibu kota baru tentu membutuhkan dukungan pembiayaan yang sangat besar. Estimasi kebutuhan anggaran pembangunan IKN mencapai ratusan triliun rupiah dan akan dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu panjang. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk merancang strategi pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan agar pembangunan dapat berjalan tanpa memberikan tekanan yang berlebihan terhadap keuangan negara.

Dalam konteks kebijakan publik, dinamika penganggaran pembangunan IKN menjadi topik yang menarik untuk dikaji karena mencerminkan perubahan pendekatan pemerintah dalam membiayai proyek pembangunan berskala besar. Pemerintah tidak lagi sepenuhnya mengandalkan APBN, melainkan membuka peluang pembiayaan dari berbagai sumber lain seperti investasi swasta, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, serta peran badan usaha milik negara.

Selain itu, pembangunan IKN juga memiliki implikasi terhadap pengelolaan proyek strategis nasional lainnya. Alokasi anggaran yang besar untuk proyek ini berpotensi mempengaruhi prioritas pembangunan di sektor lain jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, analisis terhadap dinamika penganggaran pembangunan IKN menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan fiskal pemerintah diarahkan dalam mendukung pembangunan nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penganggaran pembangunan IKN serta implikasinya terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penganggaran pembangunan IKN serta implikasinya terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur. Kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif pemerintahan, tetapi juga merupakan bagian dari strategi pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada pemerataan pembangunan nasional. Selama beberapa dekade terakhir, pembangunan di Indonesia cenderung terpusat di Pulau Jawa, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kondisi tersebut menyebabkan ketimpangan pembangunan antar wilayah yang cukup

signifikan. Selain persoalan ketimpangan wilayah, Jakarta juga menghadapi berbagai tantangan serius seperti kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, serta penurunan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota dipandang sebagai salah satu solusi strategis untuk menciptakan pusat pemerintahan yang lebih efisien sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa.

Namun demikian, pembangunan ibu kota baru tentu membutuhkan dukungan pembiayaan yang sangat besar. Estimasi kebutuhan anggaran pembangunan IKN mencapai ratusan triliun rupiah dan akan dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu panjang. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk merancang strategi pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan agar pembangunan dapat berjalan tanpa memberikan tekanan yang berlebihan terhadap keuangan negara. Dalam konteks kebijakan publik, dinamika penganggaran pembangunan IKN menjadi topik yang menarik untuk dikaji karena mencerminkan perubahan pendekatan pemerintah dalam membiayai proyek pembangunan berskala besar. Pemerintah tidak lagi sepenuhnya mengandalkan APBN, melainkan membuka peluang pembiayaan dari berbagai sumber lain seperti investasi swasta, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, serta peran badan usaha milik negara.

Selain itu, pembangunan IKN juga memiliki implikasi terhadap pengelolaan proyek strategis nasional lainnya. Alokasi anggaran yang besar untuk proyek ini berpotensi mempengaruhi prioritas pembangunan di sektor lain jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, analisis terhadap dinamika penganggaran pembangunan IKN menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan fiskal pemerintah diarahkan dalam mendukung pembangunan nasional. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penganggaran pembangunan IKN serta implikasinya terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

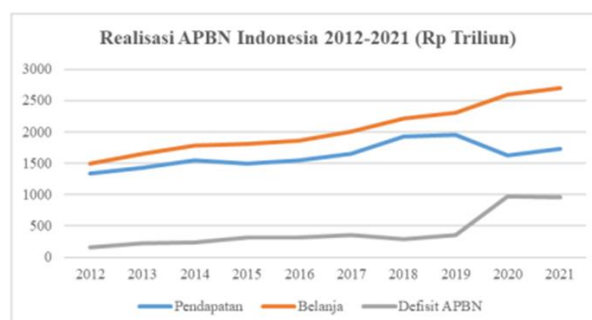
3.1 Kebijakan Pembiayaan Pembangunan IKN

Pembangunan IKN membutuhkan dukungan pembiayaan yang sangat besar sehingga pemerintah merancang berbagai skema pendanaan yang tidak sepenuhnya bergantung pada APBN. Strategi ini dilakukan untuk menjaga stabilitas fiskal negara sekaligus membuka peluang partisipasi dari berbagai pihak dalam pembangunan ibu kota baru.

Secara umum, pembiayaan pembangunan IKN dirancang melalui beberapa sumber utama, yaitu:

1. Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

APBN digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar serta fasilitas pemerintahan utama. Penggunaan APBN difokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan fungsi pemerintahan.



2. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Skema ini memungkinkan pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur tertentu. Melalui skema KPBU, risiko pembiayaan dapat dibagi antara pemerintah dan sektor swasta.

3. Investasi Swasta

Pemerintah juga membuka peluang bagi investor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan berbagai fasilitas pendukung seperti kawasan bisnis, perumahan, dan infrastruktur komersial.



4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan IKN, terutama dalam proyek-proyek infrastruktur strategis. Pendekatan pembiayaan yang beragam ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menciptakan model pembangunan yang lebih berkelanjutan.

3.2 Dinamika Penganggaran Dalam Pembangunan IKN

Dinamika penganggaran pembangunan IKN tidak terlepas dari berbagai faktor, baik yang bersifat ekonomi, politik, maupun kelembagaan. Dalam implementasinya, pemerintah harus memastikan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan IKN tidak mengganggu stabilitas fiskal negara. Salah satu strategi yang dilakukan adalah membatasi proporsi pembiayaan dari APBN. Dengan demikian, pemerintah dapat tetap menjaga keseimbangan anggaran sekaligus memastikan bahwa pembangunan IKN dapat berjalan secara bertahap sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah juga berupaya menciptakan berbagai kebijakan yang dapat meningkatkan minat investasi di kawasan IKN. Kebijakan tersebut mencakup penyediaan insentif investasi, penyederhanaan regulasi, serta pengembangan infrastruktur pendukung.

3.3 Dinamika Penganggaran dan Kelembagaan dalam Pembangunan IKN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik wilayah baru, tetapi juga mencakup pembentukan sistem kelembagaan dan model pengelolaan ekonomi yang mendukung keberlanjutan pembangunan. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian dalam pembangunan IKN adalah bagaimana pemerintah merancang struktur kelembagaan yang mampu mengelola investasi, pembiayaan, serta pengembangan kawasan secara efektif.

Setelah diterbitkannya Keputusan Presiden mengenai pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara, lembaga ini diberikan kewenangan yang cukup luas dalam mengelola pembangunan dan pengembangan kawasan IKN. Otorita IKN tidak hanya bertindak sebagai lembaga administratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mengelola berbagai kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pembangunan kawasan ibu kota baru. Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah kemampuan untuk memiliki atau mengendalikan badan usaha yang berfungsi sebagai instrumen pengelolaan

pembangunan.

Dalam konteks ini, keberadaan badan usaha milik otorita menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan IKN. Badan usaha tersebut diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengelola berbagai proyek pembangunan, menarik investasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di kawasan ibu kota baru. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah tantangan yang berkaitan dengan regulasi dan perencanaan pembentukan badan usaha tersebut.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa hingga saat ini regulasi yang secara khusus mengatur mengenai pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik otorita masih belum sepenuhnya komprehensif. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk merumuskan kerangka regulasi yang lebih jelas agar badan usaha tersebut dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pembangunan IKN.

KESIMPULAN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan proyek strategis nasional yang memiliki dampak besar terhadap kebijakan pembangunan dan pengelolaan anggaran negara. Dinamika penganggaran pembangunan IKN menunjukkan adanya perubahan pendekatan pemerintah dalam membiayai proyek pembangunan berskala besar melalui kombinasi berbagai sumber pendanaan.

Pendekatan tersebut memberikan peluang untuk menciptakan model pembiayaan pembangunan yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Namun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada kesiapan regulasi, stabilitas kebijakan investasi, serta efektivitas koordinasi antar lembaga pemerintah.

Oleh karena itu, penguatan tata kelola anggaran, peningkatan transparansi kebijakan, serta pengembangan strategi pembiayaan yang adaptif menjadi langkah penting dalam memastikan keberhasilan pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional. Oleh karena itu, penguatan tata kelola anggaran, peningkatan transparansi kebijakan, serta pengembangan strategi pembiayaan yang adaptif menjadi langkah penting dalam memastikan keberhasilan pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Diani Sadiawati, R. D. (31-08-2024). Comparative Study of the Regulation and Planning of National Capital Authority-Owned Enterprises in Realizing Sustainable Development of the Nusantara's Capital City. Vol. 8 No. 2 (2024).

Bibliography

Diani Sadiawati, R. D. (31-08-2024). Comparative Study of the Regulation and Planning of National Capital Authority-Owned Enterprises in Realizing Sustainable Development of the Nusantara's Capital City. Vol. 8 No. 2 (2024).

siswantoro. (2022). Analisis Tingkat Kesiapan Anggaran dan Pembiayaan Indonesia dalam Memindahkan Ibu Kota. Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersialBerbagiSerupa4.0Internasional.